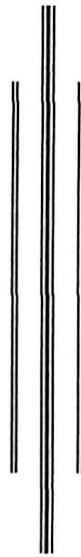




**PERJANJIAN KINERJA
SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**



**KECAMATAN MUARA HARUS
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN MUARA HARUS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp**
Jabatan : Camat Muara Harus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H, S.T, M.T**
Jabatan : Bupati Tabalong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung, Januari 2026

Pihak Kedua,
BUPATI TABALONG,

IR. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H, S.T, M.T

Pihak Pertama,
CAMAT MUARA HARUS,

RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp
Pembina TK.I
NIR: 19700914 199503 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

CAMAT MUARA HARUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	- Persentase kesesuaian Antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	86 %
		- Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	100 %
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	- Predikat Nilai AKIP perangkat daerah	BB

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.075.558.978	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	266.703.480	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	120.033.830	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	57.527.624	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	147.208.120	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.662.800	APBD
Jumlah		4.707.694.832	

Tanjung, Januari 2026

Pihak Kedua,

BUPATI TABALONG



Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H, S.T, M.T

Pihak Pertama,

CAMAT MUARA HARUS



RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

Pembina TK.I

NIP. 19700914 199503 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JAMIATUSIAH, SE**
Jabatan : Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp**
Jabatan : Camat Muara Harus

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
CAMAT MUARA HARUS,

RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp
Pembina TK.I
NIP. 19700914 199503 1 006

Pihak Pertama,
Kasi Pembangunan

JAMIATUSIAH, SE
Penata TK.I
NIP. 19730330 200501 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW,LPM,PKK,Karang Taruna dll)	7 Kegiatan
		Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat	7 Kegiatan
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi Antara pemerintah desa dan kecamatan	Jumlah pertemuan koordinasi rutin Antara kecamatan dan desa	4 Kegiatan
		Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala	100 %
		Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes	100%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa ➤ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa - Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan ➤ Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	17.415.000,- 102.618.830,-	APBD APBD

2.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.		
	➤ Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa ➤ Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	17.573.700,- 23.089.100,-	APBD APBD
	Jumlah	160.696.630,-	

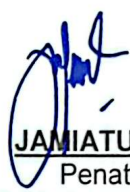
Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
CAMAT MUARA HARUS,



RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp
Pembina TK.I
NIP. 19700914 199503 1 006

Pihak Pertama,
Kasi Pembangunan,



JAMIATUSIAH, SE
Penata TK.I
NIP.19730330 200501 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. ELM I**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JAMIATUSIAH, SE**
Jabatan : Kasi Pembangunan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran,

M. ELM I
Pengatur TK.I
NIP.19780603 201001 1 005

Pihak Kedua,
Kasi Pembangunan,

JAMIATUSIAH, SE
Penata TK.I
NIP. 19730330 200501 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya tugas membantu kegiatan dan administrasi di Kasi Pembangunan	Jumlah pelaksanaan dalam membantu kegiatan dan administrasi di Kasi Pembangunan	12 bulan
2.	Terlaksananya tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan	Tugas – tugas lain dari atasan	12 bulan

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasi Pembangunan,



JANIATUSIAH, SE
Penata TK.I

NIP. 19730330 200501 2 006

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran,

M. ELMI

Pengatur TK.I

NIP. 19780603 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPIANI, S.Sos**
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp**
Jabatan : Camat Muara Harus

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,

CAMAT MUARA HARUS,



RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

Pembina TK.I

NIP. 19700914 199503 1 006

Pihak Pertama,

Kasi Pemerintahan

SUPIANI, S.Sos

Penata TK.I

NIP.19701103 198903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

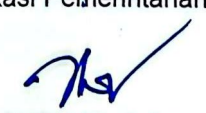
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara	1 Kegiatan
		Jumlah kegiatan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	4 Kegiatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ➤ Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah. ➤ Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ➤ Pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	129.708.120,- 17.500.000,-	APBD APBD
	Jumlah	147.208.120,-	

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,

CAMAT MUARA HARUS,
RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp
 Pembina TK.I
 NIP. 19700914 199503 1 006

Pihak Pertama,
 Kasi Pemerintahan

SUPIANI, S.Sos
 Penata TK.I
 NIP. 19701103 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MULIADI**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUPIANI, S.Sos**
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasi Pemerintahan ,

SUPIANI, S.Sos
Benata TK.I
NIP. 19701103 198903 1 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran,

MULIADI
Pengatur TK.I
NIP. 19700514 200906 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya tugas membantu kegiatan dan administrasi di Kasi Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan dalam membantu kegiatan dan administrasi di Kasi Pemerintahan	12 bulan
2.	Terlaksananya tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan	Tugas – tugas lain dari atasan	12 bulan

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasi Pemerintahan ,



SUPIANI, S.Sos
 Penata TK.I
 NIP. 19701103 198903 1 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran,



MULIADI
 Pengatur TK.I
 NIP.19700514 200906 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NATANAEL, S.AP**
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp**
Jabatan : Camat Muara Harus

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Camat Muara Harus,



RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp
Pembina TK.I
NIP. 19700914 199503 1 006

Pihak Pertama,
Kasi Tramtib,

NATANAEL, S.AP
Penata Tk.I
NIP. 19720110 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah	12 Kegiatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ➢ Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ➢ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.	57.527.624,-	APBD
	Jumlah	57.527.624,-	

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Camat Muara Harus,



RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp
Pembina TK.I
NIP. 19700914 199503 1 006

Pihak Pertama,
Kasi Tramtib,



NATANAEL, S.AP
Penata Tk.I
NIP.19720110 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINI HIJENAH, SE**
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp**
Jabatan : Camat Muara Harus

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,

CAMAT MUARA HARUS,



RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

Pembina TK.I

NIP. 19700914 199503 1 006

Pihak Pertama,

Kasi Kesra



RINI HIJENAH, SE

Penata TK.I

NIP.19741228 200701 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa / kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan.	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa / kelurahan	4 Kegiatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	➢ Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan		
	➢ Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	126.379.672,-	APBD
	➢ Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	140.323.808,-	APBD
	Jumlah	266.703.480,-	

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,

CAMAT MUARA HARUS,


RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp
 Pembina TK.I
 NIP. 19700914 199503 1 006

Pihak Pertama,

Kasi Kesra



RINI HIJENAH, SE

Penata TK.I

NIP.19741228 200701 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SEKRETARIS KECAMATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RISKANADA, S.STP, M.A**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp**
Jabatan : Camat Muara Harus

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,

CAMAT MUARA HARUS,


RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp
Pembina TK.I
NIP. 19700914 199503 1 006

Pihak Pertama,

Sekretaris Kecamatan


RISKANADA, S.STP, M.A
Penata TK.I
NIP.19901002 201206 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS KECAMATAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		
	Kegiatan :		
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	18.064.910,-	APBD
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3.966.420,-	APBD
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.707.750,-	APBD
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1.641.150,-	APBD
	- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2.009.470,-	APBD
	- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	2.492.320,-	APBD
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.840.950,-	APBD
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.774.350,-	APBD
	- Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	2.632.500,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.203.769.420,-	APBD
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.199.986.600,-	APBD
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2.058.420,-	APBD
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1.724.400,-	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.566.150,-	APBD
	- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	4.566.150,-	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.200.000,-	APBD
	- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	22.200.000,-	APBD
5.	Administrasi umum Perangkat Daerah	366.174.462,-	APBD
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.481.500,-	APBD
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.862.068,-	APBD
	- Penyediaan peralatan rumah tangga	12.478.412,-	APBD
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.053.882,-	APBD
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000,-	APBD
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	300.298.600,-	APBD
6.	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan urusan pemerintah daerah	104.708.076,-	APBD
	- Pengadaan mebel	39.732.960,-	APBD

	- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	64.975.116,-	APBD
7.	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.	214.303.200,-	APBD
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000,-	APBD
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	184.303.200,-	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	141.772.760,-	APBD
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	115.140.000,-	APBD
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	17.032.756,-	APBD
	- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	9.600.004,-	APBD
	Jumlah	4.075.558.978,-	

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,


CAMAT MUARA HARUS,
RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp
 Pembina TK.I
 NIP. 19700914 199503 1 006

Pihak Pertama,

Sekretaris Kecamatan,

RISKANADA, S.STP, M.A
 Penata TK.I
 NIP. 19901002 201206 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENYTHA LUSYSHA, A.Md**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RISKANADA, S.STP, MA**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan,

RISKANADA, S.STP, MA
Penata TK.I
NIP.19901002 201206 2 002

Pihak Pertama,
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,


HENYTHA LUSYSHA, A.Md
Penata
NIP.19801117 200604 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen
		Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	7 Data
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang / bulan

2.	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan
		Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	18 Laporan

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan,

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan,



RISKANADA, S.STP, MA
Penata TK.I
NIP. 19901002 201206 2 002



HENYTHA LUSYSHA, A.Md
Penata
NIP. 19801117 200604 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHMUDI HAKKI, S.E**
Jabatan : Penata Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENYTHA LUSYSHA, A.Md**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan,


HENYTHA LUSYSHA, A.Md
Penata
NIP. 19801117 200604 2 010

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional,


MAHMUDI HAKKI, S.E
Penata Muda
NIP.19820215 200701 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penatausahaan dan administrasi keuangan	Jumlah penatausahaan dan administrasi keuangan	12 bulan

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,



HENYTHA LUSYSHA, A.Md

Penata
NIP. 19801117 200604 2 010

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional,


MAHMUDI HAKKI, S.E

Penata Muda
NIP. 19820215 200701 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKA IRIAWATI, S.Ak**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENYTHA LUSYSHA, A.Md**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,

HENYTHA LUSYSHA, A.Md
Penata
NIP. 19801117 200604 2 010

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,

EKA IRIAWATI, S.Ak
Penata Muda
NIP. 19820215 200701 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penatausahaan dan laporan keuangan	Jumlah penatausahaan dan laporan keuangan	12 bulan

Pihak Kedua,
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,



HENYTHA LUSYSHA, A.Md

Penata

NIP. 19801117 200604 2 010

Muara Harus, Januari 2026
Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,



EKA IRIAWATI, S.Ak

Penata Muda

NIP.19820215 200701 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARTINI**
Jabatan : Operator Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HENYTHA LUSYSHA, A.Md**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan,



HENYTHA LUSYSHA, A.Md
Penata
NIP. 19801117 200604 2 010

Pihak Pertama,
Operator Layanan Operasional,



HARTINI
NIP. 19951018 202521 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengadministrasian perencanaan dan keuangan	Jumlah pengadministrasian perencanaan dan keuangan	12 bulan

Pihak Kedua,
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,



HENYTHA LUSYSHA, A.Md
Penata
NIP. 19801117 200604 2 010

Muara Harus, Januari 2026
Pihak Pertama,
Operator Layanan Operasional,



HARTINI
NIP.19951018 202521 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IDA ROBAITI, S.AP**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RISKANADA, S.STP, MA**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan,



RISKANADA, S.STP, MA
Penata TK.I

NIP.19901002 201206 2 002

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian,



IDA ROBAITI, S.AP
Penata Muda TK.I
NIP.19800615 201212 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, akurat dan sesuai ketentuan	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen
2.	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	20 paket
3.	Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan

No.	Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.566.150,-	APBD
	- Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.566.150,-	APBD
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.200.000,-	APBD
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	22.200.000,-	APBD

3.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	214.303.200,-	APBD
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000,-	APBD
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	184.303.200,-	APBD
	Jumlah	241.069.350,-	

Muara Harus, Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan,



RISKANADA, S.STP, MA
Penata TK.I
NIP.19901002 201206 2 002

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

IDA ROBAITI, S.AP
Penata Muda TK.I
NIP.19800615 201212 2 001